

BAB 4

ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Objek Penelitian

4.1.1. *Crude Palm Oil (CPO)*

Crude Palm Oil (CPO) merupakan salah satu komoditas strategis dalam perekonomian Indonesia. Ada tiga alasan yang dapat menjelaskan pernyataan tersebut, yaitu: *pertama*, sebagai bahan utama minyak goreng yang dikonsumsi oleh masyarakat, CPO berperan penting dalam menentukan tingkat inflasi; *kedua*, industri palm oil dapat menyerap tenaga kerja lebih dari dua juta orang; *ketiga*, ekspor CPO merupakan sumber devisa negara yang dapat menghasilkan lebih dari satu juta USD sejak tahun 1997 hingga kini.²⁵

Pengembangan agribisnis kelapa sawit merupakan salah satu langkah yang sangat diperlukan sebagai kegiatan pembangunan subsektor perkebunan dalam rangka revitalisasi sektor pertanian. Perkembangan pada berbagai subsistem yang sangat pesat pada agribisnis kelapa sawit sejak menjelang akhir tahun 1970-an menjadi bukti pesatnya perkembangan agribisnis kelapa sawit.

Perkembangan minyak kelapa sawit dunia ini sangat dipengaruhi oleh produksi minyak kelapa sawit Malaysia dan Indonesia yang memberikan kontribusi sebesar 86% dari produksi dunia, dengan persentase produksi masing-masing sebesar 43,49% untuk Malaysia dan 43,91% untuk Indonesia. Sebagai salah satu produsen utama minyak kelapa sawit dunia, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk terus berperan dalam pasar dunia. Pada dekade 1980-an, ekspor minyak kelapa sawit Indonesia hanya ke wilayah Eropa Barat, tetapi beberapa tahun terakhir ini, permintaan dari negara-negara lain seperti China, India, Pakistan, Myanmar, Kenya, Tanzania dan Afrika Selatan terus meningkat, permintaan di tahun 2009 mencapai 16,28 juta ton.

²⁵ Syafa'at, Nizwar et.al.

Dalam perdagangan CPO ini, Indonesia merupakan negara *nett exporter*, dimana impor dari Singapura dan Malaysia hanya dilakukan pada saat tertentu saja. Impor minyak kelapa sawit umumnya dalam bentuk olein dari Singapura dan Malaysia. Impor ini biasanya terjadi pada waktu harga CPO dunia tinggi, dimana terjadi *rush export* dari Indonesia. Dalam keadaan tersebut biasanya pemerintah menggunakan mekanisme pajak ekspor untuk menjamin pasokan dalam negeri.

Dunia telah mengenal Indonesia sebagai negara eksportir CPO terbesar dunia bersama dengan Malaysia. Bagi Indonesia, CPO merupakan produk unggulan non migas Indonesia yang banyak diekspor ke India dan China. Indonesia berlomba-lomba dengan negara pesaing lainnya untuk menerobos pasar besar tersebut terutama India.²⁶

Dilihat dari daya saingnya, minyak kelapa sawit ternyata cukup kompetitif dibandingkan dengan minyak nabati lainnya, karena produktivitas setiap hektarnya cukup tinggi. Kelapa sawit juga merupakan tanaman tahunan yang cukup handal terhadap berbagai perubahan agroklimat dan apabila ditinjau dari aspek gizi minyak kelapa sawit tidak terbukti sebagai penyebab meningkatnya kadar kolesterol, bahkan mengandung beta karoten sebagai pro vitamin A. Perkembangan penggunaan bahan bakar bio juga menjadikan kelapa sawit sebagai salah satu sumber minyak nabati untuk menghasilkan bahan bakar bio tersebut, sehingga perkembangan industri minyak sawit menjadi lebih prospektif. Hal ini menggambarkan bahwa prospek minyak kelapa sawit Indonesia cukup menjanjikan dan tentu saja diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan konsumsi atau permintaan CPO perlu diintensifkan, baik secara nasional maupun internasional.

Prospek pengembangan kelapa sawit relatif baik, dari sisi permintaan diperkirakan permintaan akan tetap tinggi di masa mendatang. Hal ini disebabkan preferensi terhadap minyak kelapa sawit masih tinggi dibandingkan dengan produk substitusi lainnya seperti minyak kedelai, minyak jagung dan minyak

²⁶ Bussines News, 2006

bunga matahari. Preferensi konsumen terhadap minyak kelapa sawit ini karena memiliki banyak keunggulan seperti relatif lebih tahan lama disimpan, tahan terhadap tekanan dan suhu tinggi, tidak cepat bau serta memiliki kandungan gizi yang tinggi dan bermanfaat sebagai bahan baku dari berbagai jenis industri.

Malaysia merupakan negara pesaing utama Indonesia dan umumnya CPO asal Malaysia lebih kompetitif karena antara lain mutu yang lebih baik dan adanya kemudahan yang didapat Malaysia dari negara pengimpor dan tidak diperoleh Indonesia. Namun perkembangan ekspor minyak kelapa sawit Malaysia ini diperkirakan akan tertahan oleh adanya keterbatasan sumber daya lahan dan tingginya tingkat upah tenaga kerjanya. Sedangkan Indonesia masih mempunyai potensi untuk terus berkembang karena adanya dukungan biaya produksi yang murah dan ketersediaan lahan yang potensial. Namun dalam hal ini Indonesia juga menghadapi kendala dalam pengembangan ekspornya karena tingkat konsumsi domestik yang terus meningkat. Sementara itu Malaysia pun tidak berdiam diri dan terus meningkatkan produktivitas tenaga kerjanya sehingga mereka dapat mengembangkan dengan sungguh-sungguh industri produk turunan CPO yang bernilai lebih tinggi.

Dengan melihat sumber daya alam dan manusia yang dimiliki Indonesia saat ini yang secara kuantitatif relatif jauh lebih unggul dibanding dengan Malaysia, Indonesia nampaknya berpeluang cukup besar untuk menjadi produsen minyak kelapa sawit terbesar dunia. Dari sisi sumber daya alam, Indonesia masih memiliki luas lahan untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit yang masih sangat luas yang mencapai 9 juta hektar lebih. Dan dari sisi sumber daya manusianya juga sangat besar untuk mendukung pengembangan perkebunan kelapa sawit yang membutuhkan banyak tenaga kerja. Disamping itu, dengan tingkat produktivitas tanaman yang ada saat ini, Indonesia masih berpeluang untuk meningkatkan produktivitas tanamannya dengan penggunaan bibit unggul dan pengelolaan produksi yang lebih profesional.

4.1.2. Pengembangan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit

Pengembangan tanaman kelapa sawit telah dilakukan secara luas di Indonesia, baik di kawasan barat maupun di kawasan timur Indonesia. Penyebaran areal yang berpotensi untuk pengembangan kelapa sawit tersebut umumnya terdapat di Provinsi Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Papua, Sumatera Utara, Bengkulu, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan.

Dilihat dari pengusahaannya, perkebunan kelapa sawit di Indonesia ada tiga, yaitu perkebunan rakyat, perkebunan besar negara dan perkebunan swasta. Dari ketiga jenis perkebunan tersebut memiliki pola pemasaran produk kelapa sawit yang berbeda. Perkebunan rakyat (PR) adalah bentuk usaha perkebunan yang kepemilikan, pengusahaan dan pengolahannya dilaksanakan oleh rakyat atau petani secara perorangan atau secara berkelompok. Ciri utama perkebunan rakyat adalah areal yang menyebar, luas kepemilikan lahan yang relatif tidak merata (mulai sempit hingga cukup luas), tingkat penerapan teknologi yang masih rendah serta manajemen yang belum rapi. Perkebunan rakyat terkonsentrasi pada 4 (empat) provinsi yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan dan Kalimantan Barat. Perkebunan milik negara (PTP) terkonsentrasi di Sumatera Utara, dan perkebunan swasta terkonsentrasi di Riau, Sumatera Utara, Aceh dan Sumatera Selatan. Pada saat ini terdapat enam pemain terbesar bisnis CPO yang menguasai lebih dari 50% areal perkebunan kelapa sawit yaitu PT Perkebunan Nusantara (PTPN), yang terdiri dari 9 PTPN, Sinar Mas, Raja Garuda Mas, Astra Agro Lestari, Minamas Plantation (Kelompok Guthrie Berhad asal Malaysia) dan Indofood Tbk.

Upaya pengembangan dan pembinaan perkebunan rakyat dapat melalui intensifikasi atau rehabilitasi tanaman. Kegiatan tersebut sebagai usaha untuk meningkatkan produktivitas melalui pemberian input teknologi. Perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh rakyat memiliki luas lahan yang terbatas sekitar 1-10 hektar. Dengan luas lahan tersebut, tentunya menghasilkan produksi Tandan buah segar (TBS) yang terbatas, untuk mengatasinya maka petani harus menjual TBS melalui pedagang tingkat desa yang dekat dengan lokasi kebun atau melalui KUD, kemudian berlanjut ke pedagang besar hingga ke prosesor/industri pengolah.

Pemasaran produk kelapa sawit pada perkebunan besar negara (PBN) dilakukan secara bersama melalui Kantor Pemasaran Bersama (KPB), sedangkan untuk perkebunan besar swasta (PBS), pemasaran produk kelapa sawit dilakukan oleh masing-masing perusahaan. Pada umumnya perusahaan besar baik negara maupun swasta menjual produk kelapa sawit dalam bentuk olahan yaitu minyak sawit mentah (CPO) dan minyak inti sawit (*Palm Kernel Oil* atau PKO). Penjualan langsung kepada eksportir ataupun ke pedagang/industri dalam negeri.²⁷

Tabel.4.1. Luas Areal Dan Produksi Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia Menurut Pengusahaan

Tahun	Luas Areal (Ha)				Produksi (ton)			
	PR	PBN	PBS	Jumlah	PR	PBN	PBS	Jumlah
2000	1.166.758	588.125	2.403.194	4.158.077	381.131	292.191	726.78	1.400.102
2001	1.561.031	609.947	2.542.457	4.713.435	557.917	303.858	813.901	1.675.676
2002	1.808.424	631.566	2.627.068	5.067.058	621.346	313.39	896.333	1.831.069
2003	1.854.394	662.803	2.766.360	5.283.557	668.292	350.13	1.086.300	2.104.722
2004	2.220.338	605.865	2.458.520	5.284.723	730.96	355.895	1.180.416	2.267.271
2005	2.356.895	529.854	2.567.068	5.453.817	855.146	318.836	1.300.550	2.474.532
2006	2.636.425	696.699	2.741.802	6.074.926	974.821	425.882	1.391.356	2.792.059
2007	2.857.777	717.803	2.849.481	6.425.061	1.031.908	432.084	1.486.511	2.950.503
2008	3.079.129	738.906	2.957.161	6.775.196	1.115.419	453.338	1.581.666	3.150.423

Sumber: Ditjen Perkebunan, Deptan

Indonesia memiliki luas areal perkebunan kelapa sawit yang terus mengalami peningkatan. Dalam 10 tahun terakhir ini, luas areal perkebunan kelapa sawit di Indonesia semakin meningkat dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 8,7% pertahun, pada tahun 2000 luasnya sekitar 4.158 ribu hektar, dan pada tahun 2008 telah mencapai sekitar 6.775 ribu hektar. Menurut Ditjen Perkebunan, areal perkebunan kelapa sawit tersebar meliputi wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.

²⁷Agustian, Adang dan Prajogo U. Hadi

Perkebunan kelapa sawit di Indonesia mempunyai peran yang sangat strategis dari sisi ekonomi antara lain sebagai komoditas untuk peningkatan ekspor, penyerapan kesempatan kerja, menekan jumlah penduduk miskin, mendorong pusat pertumbuhan wilayah, mencukupi kebutuhan konsumsi dalam negeri, dan lain-lain. Indonesia merupakan wilayah yang berpotensi untuk terus mengembangkan perkebunan kelapa sawit karena luas wilayahnya masih memungkinkan untuk terus dilakukan perluasan areal perkebunan. Untuk cadangan lahan perkebunan kelapa sawit, Indonesia masih memiliki lahan yang sangat luas. Mengenai potensi ketersediaan lahan perkebunan kelapa sawit sudah tersebar di 19 provinsi di Indonesia, dengan areal perkebunan terluas di pulau Sumatera, khususnya di provinsi Sumatera Utara dan Riau.

Tabel.4.2. Potensi Ketersediaan Lahan Kelapa Sawit Di Indonesia

No	Provinsi	Luas (Ha)
1	Nanggroe Aceh Darussalam	384.871
2	Sumatera Utara	37.00
3	Sumatera Barat	355.814
4	Riau	2.563.156
5	Jambi	1.818.118
6	Sumatera selatan	1.483.959
7	Bangka Belitung	593.038
8	Bengkulu	208.794
9	Lampung	336.872
10	Jawa Barat	224.706
11	Banten	63.742
12	Kalimantan Barat	1.681.168
13	Kalimantan Tengah	3.610.819
14	Kalimantan Selatan	1.162.959
15	Kalimantan Timur	4.700.333
16	Sulawesi Tengah	256.238
17	Sulawesi Selatan	192.370
18	Sulawesi Utara	10.264
19	Papua	6.331.128

Sumber: Ryan Kiryanto, 2008

4.1.3. Produktivitas CPO Indonesia

Seiring dengan penambahan luas areal perkebunan serta berkembangnya industri kelapa sawit di berbagai wilayah seperti Sumatera dan Kalimantan serta membaiknya harga CPO dunia, mendorong produksi CPO nasional terus meningkat setiap tahun. Dalam periode tahun 2005-2008 pertumbuhan produksi CPO mengalami rata-rata peningkatan sekitar 14,5% per tahun. Jika tahun 2005 produksi CPO nasional tercatat masih 11,9 juta ton, maka pada 2008 produksi CPO sudah melonjak mencapai sekitar 19,4 juta ton.

Kelapa sawit memiliki produktivitas relatif lebih tinggi dan biaya produksi yang lebih rendah dibanding minyak nabati lain seperti minyak kedelai dan minyak bunga matahari. Kelapa sawit bisa mencapai produksi hingga 4 ton per hektar, bahkan lebih, sedangkan biji kedelai hanya mencapai 0,4 ton per hektar dan biji matahari mencapai 0,5 ton per hektar.

Tingkat produktivitas tanaman kelapa sawit Indonesia bervariasi menurut jenis kepemilikan. Menurut Departemen Pertanian, pada umumnya tingkat produktivitas perkebunan rakyat (PR) paling rendah dibandingkan perkebunan negara (PBN) dan perkebunan swasta (PBS). Diperkirakan produktivitas perkebunan rakyat hanya mencapai rata-rata 2,5 ton CPO per hektar dan 0,33 ton minyak inti sawit (PKO) hal ini disebabkan kurangnya perawatan perkebunan tersebut. Sementara itu, perkebunan negara memiliki produktivitas tertinggi yang mampu menghasilkan rata-rata sekitar 4,82 ton CPO per hektar dan 0,91 ton PKO per hektar. Sedangkan untuk perkebunan swasta rata-rata menghasilkan 3,48 ton CPO per hektar dan 0,57 ton PKO per hektar.

Meskipun mengalami peningkatan, tingkat produktivitas ketiga jenis perkebunan tersebut masih berada dibawah potensi produktivitas bahan tanaman unggul sebesar 7-8 ton CPO/ha/tahun dan produktivitas nasional Malaysia untuk periode yang sama yaitu antara 4,21 – 4,43 ton CPO/ha/tahun. Hal ini mengisyaratkan bahwa peluang untuk meningkatkan produktivitas kebun di berbagai jenis perusahaan masih ada, sehingga gerakan peningkatan produktivitas nasional harus menjadi tema penting dalam pengembangan kelapa sawit ke depan. Pada tahun 2010, jumlah ekspor minyak kelapa sawit Indonesia

diproyeksikan akan menyamai jumlah ekspor Malaysia. Perkembangan ekspor minyak sawit Malaysia tertahan oleh adanya keterbatasan lahan dan tingginya tingkat upah tenaga kerja.

Apabila dilihat dari potensi luas lahan dan sumber daya manusia yang tersedia, Indonesia jauh lebih unggul dibanding Malaysia. Sedangkan untuk tingkat produktivitas kelapa sawit Indonesia masih dibawah Malaysia. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam industri kelapa sawit diantaranya kurang optimalnya dukungan riset yang memadai untuk pengembangan produksi maupun produk turunannya serta standarisasi dan sertifikasi bibit yang belum sempurna.

Produksi minyak kelapa sawit di dalam negeri diserap oleh industri pangan terutama industri minyak goreng dan industri non pangan seperti industri kosmetik dan farmasi. Namun, potensi paling besar adalah industri minyak goreng, Indonesia mengkonsumsi sekitar 45% dari produksi minyak kelapa sawitnya untuk bahan baku industri minyak goreng. Indonesia juga merupakan negara pengonsumsi minyak kelapa sawit terbesar diantara negara-negara sedang berkembang.

Untuk menjamin ketersediaan bahan baku industri minyak goreng dalam negeri, pajak ekspor terhadap minyak kelapa sawit digunakan sebagai instrumen untuk memonitor keluar masuknya minyak kelapa sawit ke pasar ekspor yang relatif lebih menguntungkan setiap saat. Berbagai bentuk campur tangan telah diambil untuk menjaga harga dalam negeri supaya lebih rendah dibanding harga dunia dan harga yang stabil bagi konsumen dalam negeri. Pemberlakuan pajak ekspor pertama dilakukan pada bulan September 1994 ketika harga minyak kelapa sawit di pasar dunia melebihi 500 USD per ton-nya, yang merupakan tingkat harga yang sangat menarik untuk keluarnya suplai dalam negeri ke pasar internasional.

Kelapa sawit dengan beberapa keunggulan yang dimilikinya, baik dari segi produktivitas, ragam kegunaan maupun harganya, hal tersebut telah memberikan suatu kondisi yang mampu meningkatkan *share* minyak sawit dan sekaligus menjadi *leader* di pasar minyak nabati dunia dengan menguasai pangsa pasar sebesar 44% di pasar dunia. Dapat dilihat bahwa di masa yang akan datang tingkat

pertumbuhan konsumsi minyak sawit dunia relatif lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan produksinya.

4.1.4. Ekspor CPO

Ekspor komoditas CPO merupakan salah satu andalan perolehan devisa ekspor nasional. Seiring dengan peningkatan produksinya, volume ekspor CPO nasional selama kurun waktu 2000 sampai dengan 2008 juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tujuan utama ekspornya yaitu ke negara India, Belanda, China dan Singapura. Dilihat dari potensi pasarnya baik pasar domestik maupun pasar internasional, tampaknya pemasaran CPO masih cukup cerah. Indikasi prospek pemasaran CPO yang cerah ini antara lain dapat dilihat dari sisi konsumsi CPO yang terus meningkat dengan laju pertumbuhan 7,65% per tahun di dunia, dan sekitar 8,25% per tahun di Indonesia. Berdasarkan data Bank Indonesia pada triwulan keempat tahun 2008, ekspor CPO Indonesia diserap sebanyak 34% oleh India, sementara Cina sebesar 11,6%.

Pada saat ini Indonesia tercatat sebagai pemasok CPO terbesar di dunia. Dengan total produksi sebesar 21,14 juta ton, dimana sebanyak 4,86 juta ton diantaranya untuk dikonsumsi dalam negeri, dan sisanya sebesar 16,28 juta ton untuk diekspor. Banyaknya jumlah CPO yang diekspor menjadikan CPO sebagai andalan devisa negara selain migas, hal ini ditunjukkan dengan total nilai ekspor CPO berikut produk turunannya mencapai lebih dari 11,28 milyar USD.

Sementara itu, di sisi lain terdapat tiga permasalahan yang dihadapi dalam produksi dan pemasaran CPO nasional antara lain: *pertama*, dari aspek produksi, seringkali dihadapi permasalahan yaitu berupa keterbatasan permodalan untuk pembiayaan input usaha tani terutama perkebunan rakyat sehingga menjadi masalah serius dalam peningkatan produksi sawit nasional; *kedua*, terdapatnya hambatan perdagangan berupa tarif bea masuk yang tinggi pada negara-negara importir CPO seperti India, dan penerapan sistem kuota impor atas CPO dari Indonesia; dan *ketiga*, terdapatnya beberapa upaya yang dapat menghambat ekspor CPO dari Indonesia yang dilakukan oleh negara produsen minyak nabati lain seperti minyak kedelai, minyak biji matahari dan lainnya, yaitu dengan

propaganda penekanan bahwa minyak CPO mengandung lemak jenuh dan kolesterol tinggi yang berbahaya bagi kesehatan manusia, dengan tujuan propaganda tersebut untuk melindungi industri minyak nabati yang banyak diproduksi negara tersebut yang tidak memiliki industri CPO.

Pada era persaingan global sekarang ini, produk CPO nasional harus bersaing ketat dengan produk sejenis dari negara pesaing seperti Malaysia. Produk ekspor dari komoditas kelapa sawit antara lain berupa minyak kelapa sawit (CPO), minyak inti sawit (PKO), inti sawit dan bungkil inti sawit. Dari komposisi produk tersebut CPO dan PKO merupakan dua produk utama dimana volume ekspornya cukup dominan. Apabila dilihat perkembangan pangsa volume ekspor CPO Indonesia terhadap total volume ekspor dunia, tampaknya mengalami peningkatan yang cukup signifikan (19,86% per tahun). Peningkatan ini disebabkan karena semakin meningkatnya produksi sawit nasional, menurunnya pajak ekspor kelapa sawit sehingga mendorong meningkatnya volume ekspor, dan adanya kelonggaran hambatan tarif dari negara-negara importir CPO yaitu berupa penurunan bea masuk CPO sehingga akan semakin memudahkan Indonesia sebagai negara eksportir memasukkan produk tersebut ke negara importir.

Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk maka akan terjadi kenaikan kebutuhan konsumsi minyak makan, dengan demikian volume produksi minyak makan (*olein*) dunia akan terus terdongkrak, sehingga pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan CPO sebagai salah satu bahan baku utama minyak makan. Dengan meningkatnya kebutuhan CPO dunia, maka peluang pasar CPO dunia semakin terbuka bagi negara Indonesia sebagai negara pemasok utama komoditas CPO di pasar dunia.

India sebagai negara mitra dagang utama yang mengimpor CPO Indonesia, terus berpeluang untuk menjadi pasar yang berpotensi untuk memaksimalkan pemasaran CPO Indonesia. Jumlah penduduk India mencapai sekitar 1,1 milyar jiwa. Sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk maka konsumsi akan minyak nabati dan lemak turut meningkat. Negara India membutuhkan sekitar 12 juta ton minyak nabati, karena tingginya konsumsi domestik di India, sedangkan produksi domestik hanya sekitar 5-6 juta ton, jadi setengah dari jumlah kebutuhan

minyak nabatinya dipenuhi dengan cara mengimpornya. Pasar India lebih banyak membutuhkan impor minyak sawit dalam bentuk mentah.

Pertumbuhan nilai ekspor CPO cenderung terus meningkat, dalam kurun waktu 5 tahun terjadi peningkatan hampir tiga kali lipat. Ekspor CPO Indonesia sekitar 58% berupa produk turunan dan 42% berupa minyak sawit. Pasar terbesar CPO Indonesia adalah India, yang secara rata-rata menyerap 2 juta ton per tahun. Peningkatan nilai ekspor tersebut terutama didorong oleh naiknya volume ekspor dan naiknya harga CPO di pasar internasional terkait dengan peningkatan permintaan CPO dunia karena banyak negara maju yang menggunakan komoditas tersebut sebagai bahan baku biofuel yang ramah lingkungan.

Pada triwulan III tahun 2008 terjadi penurunan nilai ekspor. Penurunan nilai ekspor tersebut terkait dengan besarnya pajak ekspor (PE) yang ditetapkan oleh pemerintah. pada bulan Juli 2008, PE CPO ditetapkan sebesar 20% sehingga eksportir mengurangi kegiatan ekspor meskipun harga CPO pada waktu itu tinggi. Namun ketika PE CPO kembali turun menjadi 10% di bulan Agustus 2008 dan 7,5% di bulan September 2008, maka eksportir kembali memperbanyak volume ekspor CPO.

Peningkatan ekspor yang terjadi karena peningkatan permintaan CPO dunia yang terbatas dengan peningkatan produksi CPO, maka jumlah penawaran tidak dapat memenuhi jumlah permintaan, sehingga mengakibatkan peningkatan harga CPO. Pada saat terjadi peningkatan harga CPO dunia, maka eksportir lebih mengutamakan ekspor CPO ke luar negeri karena nilai rupiah yang diperoleh akan semakin tinggi, sehingga mereka akan mendapatkan keuntungan.

Seiring dengan meningkatnya ekspor CPO Indonesia, dimana dengan meningkatnya harga CPO di pasar internasional, para eksportir secara besar-besaran mengekspor hasil produksi CPO untuk memenuhi permintaan pasar internasional. Sekitar 60% dari produk CPO Indonesia diekspor ke luar negeri, sementara sisanya diserap untuk konsumsi domestik. Pada saat terjadi *rush export*, pemerintah menerbitkan aturan yang mewajibkan produsen minyak kelapa sawit atau CPO untuk mengutamakan pasokan dalam negeri atau disebut *Domestic Market Obligation* (DMO). Kebijakan DMO sesuai dengan Undang-Undang

Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan, yang mengatur mengenai pengamanan kebutuhan dalam negeri. Kebijakan DMO tertuang melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 339/Kpts/PD.300/5/2007 yang ditetapkan pada tanggal 31 Mei 2007. Menurut Menteri Pertanian Anton Apriyantono, penerapan kebijakan DMO sebagai antisipasi jangka panjang untuk mengamankan kebutuhan minyak kelapa sawit dalam negeri termasuk untuk mengantisipasi kecenderungan peningkatan permintaan biodiesel.

Pada saat terjadi depresiasi maka nilai ekspor CPO meningkat. Komoditas CPO merupakan komoditas yang bersifat *local content*, sehingga tidak terpengaruh oleh adanya depresiasi rupiah. CPO tidak membutuhkan bahan impor untuk memproduksinya. Hanya saja ketika para eksportir melakukan *rush export* atau ekspor besar-besaran karena nilai rupiah yang akan diperoleh semakin banyak, maka kebutuhan CPO domestik akan terganggu. Pemerintah biasanya melakukan impor untuk menutupi kebutuhan domestik.

Dengan meningkatnya ekspor CPO Indonesia yang dibarengi dengan peningkatan impor maka ekspor CPO tetap ada pada nilai yang surplus, karena jumlah produk yang diimpor dari Malaysia juga tidak terlalu signifikan berpengaruh terhadap ekspor CPO Indonesia. Selain itu juga kualitas komoditas CPO Indonesia yang baik sehingga semakin diminati oleh para importir dunia. Selain itu juga kebutuhan pasar dunia untuk memenuhi kebutuhan CPO sebagai bahan bakar alternatif biodiesel sehingga perkembangan industri minyak sawit menjadi lebih prospektif. Hal ini menggambarkan bahwa prospek minyak kelapa sawit Indonesia cukup menjanjikan dan tentu saja diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan konsumsi atau permintaan CPO perlu diintensifkan, baik secara nasional maupun internasional.

4.1.5. Perkembangan Harga CPO Dunia

Perkembangan harga CPO dunia selama ini cukup fluktuatif dengan kecenderungan terus meningkat. Peningkatan harga tersebut terkait dengan tingginya permintaan dunia yang tidak dapat diimbangi oleh terbatasnya peningkatan pasokan CPO. Permintaan pasar dunia akan komoditas CPO terus

menunjukkan trend yang meningkat. Sesuai dengan hukum pasar, *supply and demand*, harga internasional komoditas juga terus meningkat. Sampai saat ini *CIF (Cost, Insurance, Freight) Rotterdam* dan *Malaysia Derivatives Exchange (MDEX)* masih menjadi referensi harga CPO dunia.

Besaran harga CIF Rotterdam terbentuk dari harga transaksi rata-rata 12 *buyer* besar CPO dunia yang bermarkas di kota pelabuhan Rotterdam tersebut. Khusus untuk CPO asal Indonesia, eksportir harus menanggung biaya asuransi dan *letter of credit (LC)* yang lebih mahal dari CPO dari negara lain seperti Malaysia. Hal tersebut lazim dalam perdagangan komoditas yang masuk dalam perdagangan *forward* yang memperhitungkan faktor risiko menyangkut kepercayaan dan keamanan suatu negara asal komoditas.

Dalam perdagangan internasional komoditas CPO, biasanya negara-negara importir menginginkan harga dengan sistem CIF (*Cost, Insurance, Freight*), yaitu eksportir hanya bertanggung jawab terhadap biaya pengiriman. Eksportir CPO Indonesia menanggung beberapa komponen biaya seperti freight yang besarnya berkisar US \$ 68-72 per metrik ton, insurance berkisar US \$ 1-1,5 per metrik ton, biaya tes laboratorium berkisar US \$ 0,5 – 0,75 per metrik ton, brokerage berkisar US \$ 3-4 per metrik ton, shortage berkisar US \$ 2-3 per metrik ton, sehingga dari harga CIF Rotterdam eksportir Indonesia mengeluarkan biaya sekitar US \$ 100-an per metrik ton. Namun besaran pengurangan harga tersebut berdasarkan pada negara tujuan ekspor serta volume ekspornya.²⁸

Pemerintah Indonesia memiliki kebijakan dengan menetapkan harga patokan ekspor (HPE). HPE biasanya dihitung mundur satu bulan dari rata-rata harga referensi dengan dikurangi komponen-komponen pengurangan CIF. Pada umumnya dalam ekspor CPO, Indonesia menggunakan sistem *free on board (FOB)*, yaitu penetapan harga ekspor setelah barang dimuat diatas kapal di pelabuhan ekspor.

Pada awal tahun 2003 harga minyak sawit dunia mengalami fluktuasi harga akibat krisis di Timur Tengah, namun harga komoditas kelapa sawit di pasar

²⁸Suharto, Rosediana, 2008

dunia terus berada pada rata-rata 442 US dolar per metrik ton. Harga di pasar dunia dipengaruhi oleh pergerakan harga minyak kedelai di pasar Chicago, serta merosotnya nilai tukar dolar AS terhadap rupiah. Selain itu kinerja pengembangan kelapa sawit nasional semakin membaik.

Harga CPO dunia pada tahun 2006 berpotensi naik akibat melonjaknya kebutuhan Cina (terkait dengan pembebasan kuota) dan India sebagai importir utama, serta penggunaan komoditas ini untuk kebutuhan bahan bakar alternatif biodiesel. Tingginya harga minyak dunia telah mendorong penggunaan bahan bakar yang dicampur dengan minyak nabati atau bahan bakar alternatif. Rata-rata harga CPO dunia mencapai USD 476/ton.

Pada tahun 2007, rata-rata harga CPO dunia sudah mencapai USD 776/ton, lebih tinggi dari tahun sebelumnya (USD 476/ton). Selama tahun 2007, harga CPO tertinggi terjadi pada triwulan keempat yang mencapai USD 926/ton. Tingginya harga pada periode tersebut karena lonjakan permintaan dari China dan India setelah pemerintah negara tersebut memberikan subsidi penggunaan minyak nabati untuk bahan bakar. Tingginya harga CPO dunia turut mempengaruhi harga minyak sawit mentah dan minyak goreng domestik. Untuk mengontrol harga di pasar domestik, pemerintah menetapkan tiga instrumen stabilisasi yaitu pajak ekspor (PE) sebesar 10%, pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10% yang ditanggung pemerintah dan penjualan minyak goreng bersubsidi sebanyak 10 juta liter dengan potongan harga sampai Rp. 2.500 per kepala keluarga untuk masyarakat berpendapatan rendah. Tujuan ditetapkannya ketiga instrumen tersebut antara lain untuk mempertahankan keuntungan harga tandan buah segar (TBS) di kalangan petani dan mengendalikan fluktuasi harga minyak goreng di pasar agar tidak melonjak terlalu tinggi.

Pada tahun 2008, harga CPO terus mengalami penurunan dan pada triwulan keempat hanya sebesar USD 512/ton lebih rendah dari triwulan ketiga sebesar USD 934,3/ton. Penurunan harga CPO ini sejalan dengan merosotnya harga minyak mentah dunia, melambatnya pertumbuhan ekonomi yang mengurangi permintaan CPO sehingga mempengaruhi harga komoditas menjadi anjlok. Selain itu adanya pembatalan kontrak perdagangan minyak sawit mentah

yang dilakukan importir India turut mempengaruhi anjloknya harga komoditas CPO di pasar internasional.

Untuk mengatasi harga CPO yang terus menurun, pemerintah Indonesia dan Malaysia yang memasok 85% CPO ke pasar dunia, sepakat untuk melakukan peremajaan kebun kelapa sawit seluas 250.000 hektar. Indonesia akan meremajakan kebun kelapa sawit seluas 50.000 hektar, sementara Malaysia akan meremajakan 200.000 hektar lahan sawit. Melalui langkah ini, pasokan CPO Indonesia dan Malaysia akan berkurang masing-masing sebesar 75.000 ton dan 500.000 ton. Dan kedua negara sepakat untuk meningkatkan konsumsi biodiesel domestik mulai tahun 2009 sehingga mengurangi pasokan ke pasar internasional.

Produksi CPO Indonesia pada tahun 2009 yang mencapai 21,14 juta ton, meskipun harga CPO dunia menurun, tapi ekspor CPO Indonesia masih mendominasi total ekspor non migas Indonesia. Penurunan harga CPO diimbangi dengan peningkatan volume ekspor, sehingga meskipun harganya turun tetapi volume eksportnya tetap tinggi. Indonesia lebih berkonsentrasi pada ekspor CPO daripada produk turunannya. Padahal industri CPO sangat potensial karena memiliki industri hilir yang berpotensi besar. Beberapa produk turunan CPO yang tergolong komoditas pangan, antara lain minyak goreng, mentega dan shortening. Sedangkan produk hilir CPO non pangan berbentuk biodiesel, fatty acid, fatty alcohol dan gliserin. Di sisi lain, momentum turunnya harga CPO dapat dimanfaatkan oleh pelaku industri hilir untuk meningkatkan produksi dengan menyerap kelebihan CPO dalam negeri.

4.1.6. Perkembangan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar Amerika Serikat

Dalam kegiatan perekonomian, mata uang yang digunakan mempunyai harga tertentu dalam mata uang negara lain. Harga tersebut menggambarkan berapa banyak suatu mata uang harus dipertukarkan untuk memperoleh satu unit mata uang lain. Istilah lain dari rasio pertukaran tersebut adalah nilai tukar atau kurs (*exchange rate*). Keseimbangan nilai tukar ditentukan berdasarkan interaksi kekuatan permintaan dan penawaran.

Gejolak nilai tukar dipicu oleh berbagai faktor, baik eksternal maupun internal. Dari sisi eksternal, tekanan terhadap rupiah didorong oleh melonjaknya harga minyak dunia, gejolak mata uang regional dan meningkatnya premi risiko di *emerging market*. Dari sisi internal, tekanan terhadap rupiah akhir-akhir ini ditambah dengan meningkatnya kekhawatiran masyarakat terhadap sustainability fiskal terkait dengan semakin meningkatnya beban subsidi serta kebijakan moneter yang dianggap belum sepenuhnya mengantisipasi tingginya ekspektasi inflasi.

Pada awal tahun 2000, nilai tukar rupiah mengalami *recovery* setelah krisis ekonomi yang terjadi di tahun 1997-1998, yaitu sebesar Rp. 7.580 pada triwulan pertama. Puncak krisis nilai tukar terjadi pada sekitar Juni 1998, dimana nilai tukar rupiah terhadap dolar AS lebih besar dari Rp. 14.000. Kemudian setelah dilakukan berbagai kebijakan pemerintah dalam mengatasi depresiasi nilai tukar tersebut, antar lain: penandatanganan *Letter Of Intent* (hutang luar negeri) terhadap IMF, kebijakan uang ketat (peningkatan suku bunga) dan pembekuan beberapa bank, maka nilai rupiah kembali menguat. Kondisi tersebut didukung oleh perubahan kepemimpinan politik kepada Presiden Habibie yang membawa harapan bagi pelaku pasar.

Namun selama tahun 2000 ini, kondisi kurs mengalami pelemahan, dibuka pada level Rp. 8.760 pada triwulan kedua tahun 2000 dan berangsur-angsur meningkat mencapai angka Rp. 9.675 per US dolar. Bahkan kondisi ini berlanjut di tahun 2001, puncaknya mencapai level Rp. 11.390 pada triwulan kedua tahun 2001. Sempat menguat sampai ke level Rp. 9.715 per US dolar pada triwulan ketiga, namun kembali melemah ke level Rp. 10.400 sampai dengan akhir tahun 2001. Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam periode ini kurs rupiah terhadap US dolar kembali bergejolak, walaupun masih terkendali. Hal ini terjadi karena pemerintah sedang mencari formulasi yang tepat untuk mengatasi berbagai pemulihan perekonomian. Selain itu, kondisi politik juga kembali bergolak dengan adanya pergantian kepemimpinan nasional.

Pada tahun 2002, nilai tukar rupiah cenderung menguat sejak awal tahun dan sempat diperdagangkan pada level Rp. 8.713 per US dolar pada triwulan

kedua. Selama tahun 2002, rata-rata nilai tukar rupiah sebesar Rp. 9.122 per US dolar. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya kepercayaan masyarakat karena faktor internal dan eksternal. Faktor-faktor internal tersebut antara lain:

1. Bertambahnya pasokan valuta asing akibat meningkatnya arus modal masuk dari hasil divestasi saham BCA, Niaga, Telkom dan Indosat.
2. Tekanan permintaan valuta asing dari sektor swasta khususnya dalam rangka pelunasan utang luar negeri yang jatuh tempo relatif berkurang akibat keberhasilan proses restrukturisasi utang swasta.
3. Keberhasilan pelaksanaan Paris Club III yang menyetujui penundaan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri pemerintah yang jatuh tempo dan bunganya.

Selain itu faktor eksternal juga mempengaruhi penguatan nilai tukar rupiah terhadap US dolar, yaitu menurunnya suku bunga Fed Fund, gejala melemahnya US dolar dalam skala global dan menguatnya nilai tukar regional dalam tahun 2002. Penguatan nilai tukar rupiah selama tahun 2002 berlanjut sampai akhir tahun 2003. Selama tahun 2003, nilai tukar rupiah berada pada kisaran Rp. 8.400-an per US dolar.²⁹

Namun sejak awal tahun 2004 sampai triwulan kedua tahun 2005, nilai tukar rupiah terhadap US dolar menunjukkan kecenderungan melemah secara fluktuatif. Nilai terendah nilai tukar rupiah terjadi pada triwulan ketiga tahun 2005 yaitu sebesar Rp.10.310 per US dolar, dan nilai tukar rupiah tertinggi terjadi pada triwulan pertama tahun 2004 sebesar Rp. 8.546 per US dolar. Nilai rupiah yang rendah ini terutama disebabkan laju pertumbuhan supply uang (M1) yang terlalu tinggi dibandingkan dengan yang diperlukan oleh pertumbuhan ekonomi pada saat ini. Penjelasannya adalah kelebihan likuiditas dalam perekonomian akan membuat orang berspekulasi mata uang. Selain itu, laju pertumbuhan M1 yang tinggi juga menambah tekanan inflasi. Fluktuasi yang tinggi terjadi dalam periode triwulan ketiga tahun 2004, hal ini terkait dengan kekhawatiran pelaku pasar uang atas penyelenggaraan Pemilu tahun 2004. Trend pergerakan kurs rupiah cenderung

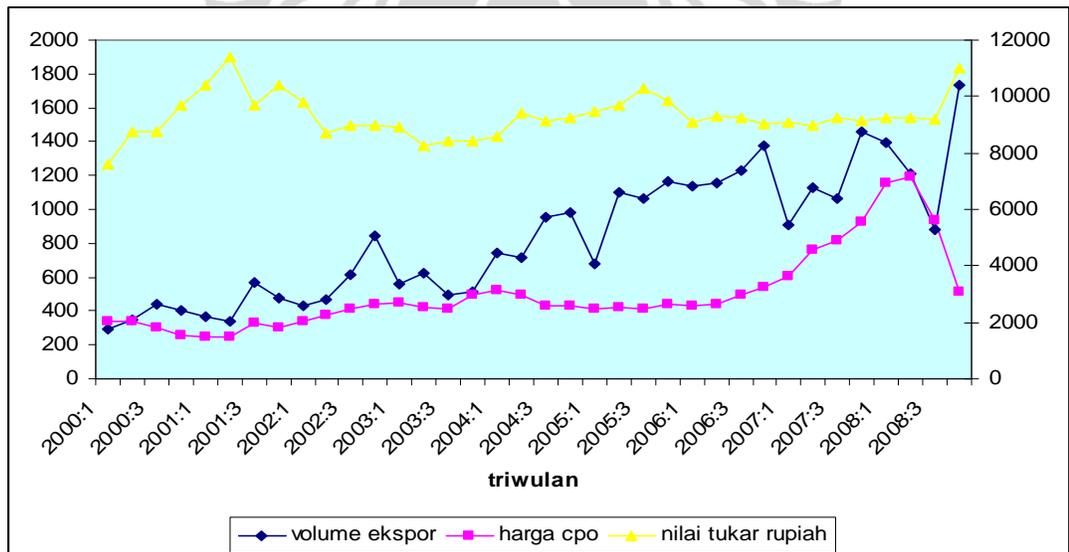
²⁹ Bank Indonesia

melemah terhadap US dolar selama tahun 2004 sampai dengan pertengahan tahun 2005, disebabkan oleh berbagai faktor, baik dari dalam maupun dari luar negeri.

Melemahnya rupiah berdampak buruk terhadap kegiatan konsumsi dan investasi karena memicu kenaikan harga barang impor dan inflasi, apalagi setelah kenaikan harga BBM yang memukul daya beli dan konsumsi masyarakat yang dapat menghambat pertumbuhan perekonomian. Kenaikan inflasi secara tajam akan memaksa Bank Indonesia menaikkan suku bunga secara tajam.

Pada awal tahun 2006 nilai tukar rupiah terhadap US dolar tidak terlalu berfluktuasi secara ekstrim, berada di sekitar level Rp. 9.000 sampai Rp. 9.200-an per US dolar. Namun pada triwulan kedua tahun 2007, rupiah kembali menguat yaitu sebesar Rp. 8.968 per US dolar. Sepanjang tahun 2008, nilai tukar rupiah melemah terhadap US dolar, tekanan depresiasi terutama dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu dampak lanjutan krisis *subprime mortgage* serta meningkatnya harga minyak dunia. Dan di akhir tahun 2008 pada triwulan keempat, nilai tukar rupiah semakin melemah mencapai Rp. 11.023 per US dolar.

Pergerakan nilai tukar, volume ekspor dan harga CPO dunia dapat dilihat dalam grafik sebagai berikut:



Sumber: Bank Indonesia, Oil World & Reuters (diolah)

Grafik 4.1. Perkembangan Nilai Tukar Rupiah, Harga CPO Dunia dan Volume Ekspor CPO Periode Triwulan Tahun 2000-2008

4.1.7. Pertumbuhan Ekonomi India

Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makroekonomi dalam jangka panjang. Dari satu periode ke periode lainnya, kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Kemampuan yang meningkat ini disebabkan karena faktor-faktor produksi akan selalu mengalami pertambahan dalam jumlah dan kualitasnya. Investasi akan menambah jumlah barang modal. Teknologi yang digunakan menjadi berkembang. Disamping itu, tenaga kerja bertambah sebagai akibat perkembangan penduduk dan pengalaman kerja dan pendidikan menambah ketrampilan mereka.

Pertumbuhan ekonomi mencerminkan kegiatan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat bernilai positif dan dapat pula bernilai negatif. Jika pada suatu periode perekonomian mengalami pertumbuhan positif, berarti kegiatan ekonomi pada periode tersebut mengalami peningkatan. Sedangkan jika pada suatu periode perekonomian mengalami pertumbuhan negatif berarti kegiatan ekonomi pada periode tersebut mengalami penurunan.

India memiliki penduduk 1,1 miliar orang dengan luas wilayah terbuka mencapai 3,3 juta kilometer persegi. Peran sektor pertanian dalam PDB sebesar 22% dengan penyerapan tenaga kerjanya sebesar 60%.³⁰ Tiga dekade setelah merdeka, pertumbuhan ekonomi India tidak jauh dari pertumbuhan penduduknya, menyebabkan tingkat kesejahteraan (pendapatan perkapita) mengalami stagnasi.

Sebelum tahun 1984, kebijakan ekonomi India didominasi oleh pengembangan industri substitusi impor yang membutuhkan banyak kebijakan proteksi atas industri dalam negeri melalui berbagai kebijakan perizinan (dikenal dengan sebutan "license raj" atau rejim perizinan). Pertumbuhan ekonomi mulai membaik sejak dikenalkannya kebijakan yang pro-bisnis pada pertengahan tahun 1980-an. Pada akhir masa pemerintahan Rajiv Gandhi tahun 1980-an, Manmohan

³⁰ Bottelier, Pieter, 2007

Singh, menteri keuangan meluncurkan program reformasi ekonomi yang luas, ekonomi India mulai tumbuh pesat. Program reformasi ekonomi ini meliputi deregulasi sektor keuangan dan liberalisasi kebijakan perdagangan yang proteksionis dan kebijakan investasi asing langsung yang amat restriktif. Dampak kumulatif program reformasi kebijakan ekonomi berhasil mendorong investasi swasta langsung, termasuk swasta asing, sehingga meningkat 7-8% dari Produk Domestik Bruto India dalam waktu 4-5 tahun.

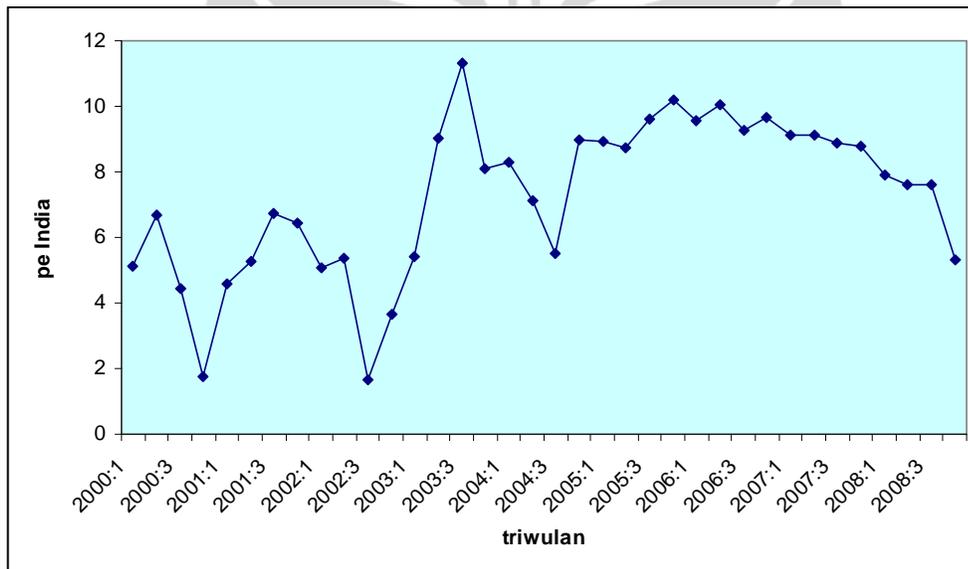
Sejak liberalisasi ekonomi di awal tahun 1990-an, India muncul sebagai negara utama dalam teknologi informasi dan komunikasi serta business process outsourcing (BPO) yang berhasil meningkatkan pertumbuhan rata-rata 6% pertahun. Pada dekade ini, ekonomi India mulai terbuka dengan dunia luar, khususnya perdagangan internasional dan penanaman modal asing. Tahun 2004-2006, pertumbuhan ekonomi India melebihi 7% per tahun.

Pertumbuhan ekonomi India yang rata-rata di atas 8% pertahun, terjadi setelah tahun 2002. Pertumbuhan yang secara konsisten tinggi ini sebenarnya berkaitan erat dengan perkembangan sektoralnya dan dengan langkah-langkah reformasi ekonomi yang telah dilakukan sejak tahun 1984. Pertumbuhan ekonomi India tersebut diiringi oleh pertumbuhan sektoral yang seharusnya terjadi di negara-negara berkembang, yaitu pertumbuhan industri dan jasa-jasa yang relatif tinggi dan pertumbuhan sektor pertanian yang relatif rendah. Pada tahun 2006, pertumbuhan ekonomi India mencapai 9,1% per tahun. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut dicapai sejak tahun 2003 yang dilatarbelakangi juga oleh adanya langkah liberalisasi sejak tahun 1984.

Dengan laju pertumbuhan 9% pertahun, tingkat hidup rata-rata orang India meningkat empat kali lipat dalam 40 tahun. Dengan laju pertumbuhan 9% pertahun maka tingkat kesejahteraan rakyat India bisa meningkat enambelas kali lipat. India juga memiliki sistem finansial yang lebih sehat dan lebih efisien daripada China. India juga mewarisi dua hal baik dari raja Inggris yaitu kepastian penegakan hukum dan penguasaan bahasa Inggris yang baik. Hal ini merupakan faktor penting yang mendorong perkembangan pesat industri jasa-jasa teknologi informasi India. Keberhasilan India tidak hanya dilihat dari indikator PDB dan

daya saing, tetapi juga tercermin dari harapan hidup warga negaranya yang semakin panjang.

Pertumbuhan ekonomi India yang nampaknya akan terus berlangsung pada tingkat yang tinggi ini, dapat dikategorikan sebagai perekonomian yang menurut teori tahapan pertumbuhan ekonomi menurut W.W. Rostow (*Stages of Economic Growth*) telah mencapai tahap tinggal landas. Syarat-syarat tahapan tinggal landas yaitu tingkat tabungan yang minimal 5% terhadap PDB, berkembangnya beberapa industri unggulan, dan adanya sistem politik dan sosial budaya yang menopang pertumbuhan, telah dapat dipenuhi. Perkembangan pertumbuhan ekonomi India, dapat dilihat dalam grafik sebagai berikut:



Sumber: www.rbi.org.in

**Grafik 4.2. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi India
Periode Triwulan Tahun 2000-2008**

4.2. Analisis Hasil Regresi

4.2.1. Pengujian Hipotesis

Berdasarkan hasil estimasi diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$Ekspor = -16,77597 + 0,800360_{Harga} + 1,975325_{ER} + 0,060117_{PE}$$

a. Uji T

Hasil regresi menunjukkan nilai *t statistik* untuk variabel x_1 atau variabel harga CPO dunia (*Harga*), dengan menggunakan tingkat kesalahan sebesar 5%, menunjukkan hasil yang signifikan. Hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitasnya yaitu 0,0000 lebih kecil dibandingkan dengan nilai $\alpha = 0,05$. Artinya variabel harga CPO dunia berpengaruh signifikan terhadap nilai ekspor CPO yang menunjukkan ekspor CPO Indonesia. Hubungan pengaruh variabel harga CPO dunia bersifat positif yang ditunjukkan dengan angka koefisiennya bernilai positif. Artinya setiap 1 persen kenaikan harga CPO dunia maka akan meningkatkan nilai ekspor CPO sebesar 0,800360 persen, dengan asumsi variabel lain konstan.

Untuk variabel x_2 , dalam hal ini variabel nilai tukar rupiah (*ER*), dengan menggunakan tingkat kesalahan sebesar 5%, menunjukkan hasil yang signifikan. Hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitasnya yaitu 0,0202 lebih kecil dibandingkan dengan nilai $\alpha = 0,05$. Artinya variabel nilai tukar berpengaruh signifikan terhadap nilai ekspor CPO. Nilai koefisien regresi sebesar 1,975325 menunjukkan bahwa setiap 1 persen kenaikan nilai tukar rupiah akan meningkatkan nilai ekspor CPO sebesar 1,975325 persen, dengan asumsi variabel lain konstan.

Untuk variabel x_3 , dalam hal ini variabel pertumbuhan ekonomi India (*PE*), dengan menggunakan tingkat kesalahan sebesar 5%, menunjukkan hasil yang signifikan. Hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitasnya yaitu 0,0195 lebih kecil dibandingkan dengan nilai $\alpha = 0,05$. Artinya variabel pertumbuhan ekonomi India berpengaruh signifikan terhadap nilai ekspor CPO. Nilai koefisien regresi sebesar 0,060117 menunjukkan bahwa setiap 1 persen kenaikan pertumbuhan ekonomi India akan meningkatkan nilai ekspor CPO sebesar 0,060117 persen, dengan asumsi variabel lain konstan.

b. Uji F

Berdasarkan hasil regresi diperoleh nilai *F statistik* yang ditunjukkan dengan nilai probabilitas *F statistik* sebesar 0,00000. Nilai tersebut lebih kecil bila dibandingkan dengan nilai $\alpha = 0,05$, artinya variabel harga CPO dunia, nilai tukar rupiah dan pertumbuhan ekonomi India secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap nilai ekspor CPO.

4.2.2. Koefisien Determinasi

Berdasarkan hasil regresi diperoleh nilai koefisien determinasi yang ditunjukkan oleh nilai *Adjusted R²* sebesar 0,851521. Artinya model regresi ini mampu menerangkan variabel harga CPO dunia, nilai tukar rupiah dan pertumbuhan ekonomi India terhadap nilai ekspor CPO pada fungsi persamaan regresi tersebut sebesar 85,15%.

4.2.3. Pengujian Asumsi Klasik

a. Uji Autokorelasi

Menurut hasil pengujian autokorelasi pada persamaan regresi tersebut, yang dilakukan dengan melakukan uji *Breusch-Godfrey Test*, dengan melihat hasil output program *E-Views* khusus pada nilai probabilitas dari *Obs*R-squared*. Dalam hasil output ditunjukkan bahwa nilai probabilitasnya 0.124662 lebih besar dibandingkan dengan nilai $\alpha = 0,05$, maka H_0 diterima, artinya dalam persamaan regresi tersebut tidak ada hubungan residual antara satu observasi dengan observasi lainnya.

b. Uji Multikolinearitas

Berdasarkan hasil pengujian multikolinearitas pada persamaan regresi tersebut, yang dilakukan dengan cara melihat nilai matrik korelasinya. Nilai matrik korelasi berada di bawah nilai 0,75, berdasarkan hal ini menunjukkan bahwa tidak ada multikolinearitas yang kuat pada model regresi tersebut.

Tabel.4.3. Matrik korelasi

	EKSPOR	HARGA	ER	PE
EKSPOR	1.000000	0.611498	0.175801	0.475687
HARGA	0.611498	1.000000	-0.150659	0.328849
ER	0.175801	-0.150659	1.000000	-0.148456
PE	0.475687	0.328849	-0.148456	1.000000

Sumber: Output Program E-Views

c. Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil pengujian heteroskedastisitas persamaan regresi tersebut, yang dilakukan dengan melakukan uji statistik *White Heteroscedasticity Test*, dengan melihat hasil output program *E-Views* diperoleh hasil bahwa *White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance*, artinya tidak ada heteroskedastisitas pada persamaan regresi tersebut. Persamaan regresi tersebut memiliki varian residual yang konstan.

4.3. Pembahasan

Kurs atau nilai tukar rupiah sebagai salah satu indikator kemampuan nilai mata uang rupiah yang dibandingkan dengan nilai mata uang asing. Perubahan kurs keseimbangan diantara mata uang dalam negeri dan mata uang luar negeri merupakan rasio antara persentase perubahan harga dalam negeri dan persentase perubahan harga luar negeri, sehingga persentase perubahan kurs tersebut mencerminkan perbedaan tingkat inflasi diantara dua negara. Pada hipotesis diduga bahwa semakin tinggi nilai tukar rupiah atau depresiasi rupiah maka akan meningkatkan nilai ekspor komoditas CPO Indonesia ke negara India.

Berdasarkan hasil pengujian regresi diperoleh hasil bahwa semakin tinggi nilai tukar rupiah maka akan meningkatkan nilai ekspor komoditas CPO Indonesia ke negara India. Hal ini sesuai dengan hipotesis yang diduga oleh penulis dengan mendasarkan pada tinjauan teori yang telah dikemukakan. Pada saat nilai tukar rupiah semakin tinggi, artinya nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar Amerika, maka nilai ekspor komoditas CPO pun menjadi semakin meningkat, karena dalam hal ini nilai ekspor yang digunakan dalam bentuk yang telah dikonversikan ke dalam nilai dolar Amerika. Sehingga apabila rupiah terdepresiasi maka jumlah nilai ekspor komoditas CPO semakin meningkat.

Dengan terdepresiasiya rupiah maka harga CPO Indonesia menjadi lebih murah di pasaran dunia sehingga volume ekspor pun meningkat. Murahnya harga komoditas CPO di pasaran dunia, maka negara mitra dagang mengimpornya dalam jumlah yang lebih banyak sehingga volume ekspor CPO Indonesia semakin meningkat. Dengan meningkatnya peningkatan permintaan produk komoditas CPO oleh negara mitra dagang maka akan meningkatkan nilai ekspornya.

Dengan terdepresiasiya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika, maka ekspor akan meningkat dan impor akan menurun karena harga barang-barang yang diimpor akan menjadi semakin mahal. Untuk komoditas ekspor yang mengandung komponen bahan impor maka dengan menurunnya jumlah impor maka akan berpengaruh terhadap jumlah komoditas yang akan diekspor. Dalam jangka waktu pendek, depresiasi nilai tukar rupiah maka akan menunjukkan pengaruh buruk, dalam hal ini berkaitan dengan terjadinya peningkatan volume ekspor komoditas CPO ke pasaran dunia sehingga terjadi *rush export*, sedangkan di dalam negeri sendiri ketersediaan komoditas CPO untuk memenuhi kebutuhan domestik menjadi berkurang. Pemerintah biasanya melakukan impor komoditas CPO dari Malaysia untuk memenuhi kebutuhan domestik. Dengan meningkatnya volume ekspor yang terjadi karena *rush export* maka pemerintah pun melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan domestik sehingga volume impornya pun menjadi meningkat. Dalam hal ini, meningkatnya ekspor CPO diiringi dengan meningkatnya impor CPO sehingga ekspor bisa saja tetap, meningkat atau malah menjadi menurun.

Dalam hal pendapatan ekspor yang meningkat tidak cukup untuk mengkompensasi pengeluaran impor yang lebih tinggi maka ekspor akan menurun. Sedangkan apabila pendapatan ekspor yang meningkat cukup atau bahkan dapat melebihi untuk mengkompensasi pengeluaran impor maka ekspor akan meningkat. Untuk komoditas CPO ini, depresiasi rupiah mengakibatkan peningkatan volume ekspor yang semakin tinggi, karena dengan terdepresiasiya nilai tukar rupiah maka nilai ekspornya semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Komoditas CPO merupakan komoditas yang bersifat alamiah dan lokal atau disebut juga *pure nature and local product*. Berdasarkan hasil penelitian

ditunjukkan bahwa dengan terdepresiasi rupiah tidak menunjukkan adanya penurunan nilai ekspor CPO Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas komoditas ekspor CPO Indonesia memiliki kualitas yang baik dan merupakan komoditas yang mengandung komponen *pure domestic* sehingga tidak tergantung pada bahan komponen impor. Selain itu juga, komoditas CPO merupakan salah satu produk minyak nabati yang berpotensi sebagai bahan baku bio diesel sehingga daya saingnya sangat tinggi.

Dengan meningkatnya volume ekspor maka dengan sendirinya otomatis akan meningkatkan nilai ekspornya. Indonesia sebagai salah satu negara penghasil dan pengeksport komoditas CPO yang terbesar di dunia, memiliki potensi untuk terus mengembangkan kualitasnya sehingga mampu terus bersaing dengan produk ekspor dari negara lain, terutama Malaysia.

Harga CPO dunia sebagai salah satu faktor yang berpengaruh dalam ekspor CPO Indonesia. Dalam penelitian ini ditunjukkan bahwa harga CPO dunia berpengaruh signifikan dan positif terhadap ekspor CPO Indonesia, yang ditunjukkan dengan meningkatnya harga CPO dunia maka akan semakin meningkatkan nilai ekspor CPO Indonesia. Dengan meningkatnya harga CPO dunia maka semakin meningkatnya nilai ekspor CPO Indonesia. Walaupun dengan volume ekspor yang tetap jumlahnya, dengan adanya peningkatan harga CPO dunia maka akan tetap berpengaruh positif terhadap ekspor CPO Indonesia yang ditunjukkan dengan meningkatnya nilai ekspor CPO Indonesia.

Peningkatan harga tersebut terkait dengan tingginya permintaan dunia yang tidak dapat diimbangi oleh terbatasnya peningkatan pasokan CPO. Harga CPO dunia juga terus berpotensi naik akibat melonjaknya kebutuhan Cina dan India sebagai importir utama, serta penggunaan komoditas ini untuk kebutuhan bahan bakar alternatif biodiesel. Tingginya harga minyak dunia saat ini telah mendorong penggunaan bahan bakar yang dicampur dengan minyak nabati atau bahan bakar alternatif.

Pertumbuhan ekonomi India yang terjadi setelah tahun 2002 rata-rata di atas 8% pertahun. Pertumbuhan yang secara konsisten tinggi ini sebenarnya berkaitan erat dengan perkembangan sektoralnya dan dengan langkah-langkah

reformasi ekonomi yang telah dilakukan sejak tahun 1984. Pertumbuhan ekonomi India tersebut diiringi oleh pertumbuhan sektoral yang seharusnya terjadi di negara-negara berkembang, yaitu pertumbuhan industri dan jasa-jasa yang relatif tinggi dan pertumbuhan sektor pertanian yang relatif rendah. Dengan semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi India, maka kemampuan untuk meningkatkan impor CPO semakin meningkat. Hal ini untuk memenuhi kebutuhan domestiknya karena pertumbuhan industri dan jasa yang relatif tinggi. Dengan semakin meningkatnya kebutuhan CPO di India, maka Indonesia sebagai negara pengeksportir utama CPO ke India akan semakin meningkatkan volume ekspornya. Dengan semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi India yang positif, yang berarti menunjukkan kegiatan ekonominya mengalami peningkatan, maka akan meningkatkan volume ekspor CPO Indonesia ke India sehingga akan meningkatkan nilai ekspor CPO Indonesia.

Indonesia sebagai negara eksportir utama CPO di pasaran CPO dunia, maka Indonesia perlu terus untuk meningkatkan potensi produktivitas CPO untuk dapat memenuhi permintaan negara-negara lain yang memerlukan pasokan CPO Indonesia. Peningkatan produktivitas juga harus ditunjang dengan peningkatan kualitas CPO Indonesia.